WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 45);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 49);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KOTA SALATIGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB III huruf A Hasil Tahapan Pengembangan ASB **Langkah II : Entry Data** diubah menjadi :
   Setelah seluruh data sekunder terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan entry data. Data kegiatan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk dirinci untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah Kota Salatiga. Data yang dientry adalah DPA SKPD 2007, dan DPA SKPD 2008 untuk komponen Belanja Langsung, khusus untuk Jenis-jenis Analisis Standar Belanja yaitu ASB-003, ASB-005, ASB-008, ASB-016, dan ASB 029 data yang dientry adalah dari Realisasi APBD Tahun 2008. Belanja langsung merupakan belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Untuk DPA Tahun 2007 dan 2008 belanja langsung yang dientry adalah belanja langsung selain kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Kantor dan kegiatan pemeliharaan. Dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kegiatan yang sulit diukur ukuran kinerjanya.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 49) mengenai Hasil dan Jenis-jenis Analisis Standar Belanja diubah sebagai berikut :

   a. ASB-003 PELATIHAN/ BIMBINGAN TEKNIS diubah menjadi :

   Deskripsi :

   Pelatihan/ Bimbingan Teknis adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan/ pelatihan kepada pegawai atau masyarakat secara teknis.

   Pengendali belanja *(cost driver)* :
   Jumlah peserta per hari

   Satuan pengendali belanja tetap *(fixed cost)* :
   = Rp. 4.561.600,- per kegiatan

   Satuan pengendali belanja variabel *(variable cost)* :
   = Rp. 73.150,- per jumlah peserta

   Rumus Penghitungan Belanja Total :
   Belanja Tetap + Belanja Variabel
   = Rp. 4.561.600 + (Rp. 73.150 x jumlah peserta x jumlah hari)

Alokasi Belanja ASB 003 :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	21, 81 %	9, 69 %	33 ,94 %
2.	Belanja Honorarium Non PNS	21, 64 %	0, 00 %	50, 26 %
3.	Belanja Bahan Material	3, 73 %	0, 00 %	10, 63 %
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	6, 32 %	3, 95 %	8, 69 %
5.	Belanja Jasa Kantor	2, 33 %	0, 00 %	6, 70 %
6.	Belanja Cetak & Penggandaan	5, 11 %	0, 00 %	10, 51 %
7.	Belanja Sewa	2, 05 %	0, 00 %	7, 37 %
8.	Belanja Makan & Minum	30, 52 %	0, 00 %	65, 45 %
9.	Belanja Perjalanan Dinas	6, 49 %	0, 00 %	18, 13 %

Catatan : Untuk Kegiatan Pelatihan/ Bimbingan Teknis Kerjasama dengan Pihak Ketiga dapat ditambahkan belanja untuk Jasa Pihak Ketiga.

CONTOH KEGIATAN ASB 003

No.	Satker	Kegiatan
1	Kantor PDE,Perpustakaan & arsip daerah	Pelatihan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi
2	BAWASDA	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
3	Kecamatan Sidorejo	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
4	Dinas pertanian	pelatihan petani dan pelaku agribisnis
5	DISNAKER TRANS dan PERMAS	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
6	Dinas Pendidikan	Pengembangan pendidikan Keaksaraan(pemberantasan buta aksara)
7	Dinas Pendidikan	Pengembangan Mutu & Kualitas program pendidikan & pelatihan bagi Pendidik & tenaga kependidikan
8	BKD	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
9	Dinas KESSOS dan KB	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
10	Dinas Pendidikan	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Penataran kurikulum 2006 SD, SMP)
11	Kecamatan Tingkir	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
12	Kecamatan Argomulyo	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

13	Kecamatan Sidomukti	Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
14	Bapeda	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan
15	Kantor Kesbang Linmas	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
16	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah(Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Guru)
17	Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
18	Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)	Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencanaan
19	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
20	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)	Bimbingan Teknis Pengoperasian program Sistem Informasi Pengeluaran Keuangan Daerah
21	Dinas KESSOS dan KB	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar kerja bagi Anak Terlantar
22	Dinas KESSOS dan KB	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan penghuni panti Asuhan/Panti Jompo
23	Dinas KESSOS dan KB	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

b. ASB-005 FORUM KOMUNIKASI ATAU KORDINASI diubah menjadi :

Deskripsi :

Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali belanja *(cost driver)* :
Jumlah lembaga yang dicakup dalam forum komunikasi atau koordinasi

Satuan pengendali belanja tetap *(fixed cost)* :
= Rp. 17.962.400, - per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel *(variable cost)* :
= Rp. 150.350, - per Jumlah Lembaga

Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 17.962.400 + (Rp. 150.350 x Jumlah Lembaga)

Alokasi Belanja ASB 005 :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	35, 25 %	4, 14 %	66, 36 %
2.	Belanja Honorarium Non PNS	11, 17 %	0, 00 %	23, 84 %
3.	Uang Lembur	2, 29 %	0, 00 %	7, 41 %
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	5, 87 %	0, 22 %	11, 53 %
5.	Belanja Jasa Kantor	6, 94 %	0, 00 %	20, 15 %
6.	Belanja Cetak & Penggandaan	15, 63 %	7, 58 %	23, 67 %
7.	Belanja Sewa	0, 15 %	0, 00 %	0, 49 %
8.	Belanja Makan & Minum	9, 19 %	1, 11 %	17, 27 %
9.	Belanja Perjalanan Dinas	13, 51 %	0, 00 %	37, 46 %

CONTOH KEGIATAN ASB 005

No.	Satker	Kegiatan
1	Sekretariat Daerah (SETDA)	Koord. Penyusunan Lap. Kinerja Pemerintah Daerah
2	Sekretariat Daerah (SETDA)	Koord. Penyusunan Lap. Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Memfasilitasi Pengembang UKM
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Memfasilitasi Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi Peningkatan hub.kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
6	Kantor Kesbang Linmas	Koordinasi forum-forum diskusi politik
7	Badan Pengawas daerah(BAWASDA)	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
8	Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)	Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
9	Dinas Pariwisata Seni Budaya dan Olah Raga	Penyelengaraan Dialog Kebudayaan
10	Badan Penaman Modal & PUD	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
11	Kantor Kesbang Linmas	Peningkatan kapasitas aparat dlm rangka pelaks. siskamswakarsa di daerah

c. **ASB-008 MONITORING/ PENGAWASAN/ PENGAMATAN** diubah menjadi :

Deskripsi :

Monitoring/ pengawasan/ pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berujud fisik.

Pengendali belanja *(cost driver)* :
Jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan/ pengawasan/ pemeriksaan, jumlah pengamatan

Satuan pengendali belanja tetap *(fixed cost)* :
= Rp. 6.320.000,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel *(variable cost)* :
= Rp. 33.750,- per jenis obyek yang dimonitor/ diawasi/ diperiksa per titik pengamatan per jumlah pemeriksaan

Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 6.320.000 + (Rp. 33.750 x titik pengamatan)

Alokasi Belanja ASB 008 :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	58, 40 %	0, 00 %	100, 00 %
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	8, 07 %	0, 00 %	17, 81 %
3.	Belanja Jasa Kantor	0, 35 %	0, 00 %	0, 94 %
4.	Belanja Cetak & Penggandaan	7, 46 %	0, 00 %	16, 97 %
5.	Belanja Makan & Minum	18, 77 %	0, 00 %	42, 07 %
6.	Belanja Perjalanan Dinas	6, 95 %	0, 00 %	15, 92 %

CONTOH KEGIATAN ASB 008

No.	Satker	Kegiatan
1	Dinas Kesehatan	Evaluasi dan Pengembangan standar kesehatan
2	Dinas Pendidikan	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
3	Sekretariat Daerah (SEKDA)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4	Sekretariat Daerah (SEKDA)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6	Kantor Kesbang Linmas	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7	Badan Perencanaan Daerah	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan Rencana pembangunan daerah
8	Kantor Kesbang Linmas	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9	Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)	Monitoring, Evaluasi, pengendalian, Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
10	Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan pelaporan Rencana Tata Ruang
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan *Monitoring Pinjaman Modal bergulir*
12	Dinas pertanian	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
13	Dinas pertanian	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14	Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monitoring Usaha daerah dan Evaluasi Tarif PDAM)
15	DISNAKER TRANS dan PERMAS	Monitoring Evaluasi dan pelaporan *Survey KHL*
16	Badan Pengawas daerah(BAWASDA)	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
17	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

d. ASB-016 PENINGKATAN PERAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MELALUI INTERAKSI LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT diubah menjadi :

Deskripsi :

Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh penyelenggara kegiatan. Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasi.

Pengendali belanja *(cost driver)* :
Jumlah Peserta dan Jumlah Hari

Satuan pengendali belanja tetap *(fixed cost)* :
= Rp. 5.460.300,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel *(variable cost)* :
= Rp. 43.780,- per Jumlah Peserta per Jumlah Hari

Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 5.460.300 + (Rp. 43.780 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Alokasi Belanja ASB 016 :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	16, 73 %	2, 79 %	30, 67 %
2.	Belanja Honorarium Non PNS	11, 73 %	0, 00 %	33, 84 %
3.	Belanja Bahan Material	3, 71 %	0, 00 %	14, 89 %
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	8, 72 %	0, 00 %	26, 19 %
5.	Belanja Jasa Kantor	9, 11 %	0, 00 %	27, 35 %
6.	Belanja Cetak & Penggandaan	3, 00 %	0, 00 %	6, 85 %
7.	Belanja Sewa	3, 15 %	0, 00 %	8, 96 %
8.	Belanja Makan & Minum	22, 60 %	0, 00 %	66, 42 %
9.	Belanja Perjalanan Dinas	21, 25 %	0, 00 %	73, 32 %

CONTOH KEGIATAN ASB 016

No.	Satker	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
2	Dinas Pendidikan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
3	Sekretariat Daerah (SEKDA)	Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru
4	Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan
5	Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima	Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan
6	Kantor Kesbang Linmas	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba
7	Kantor Kesbang Linmas	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
8	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
9	Dinas KESSOS dan KB	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan EX trauma, Rehabilitasi dan Pelayanan, Psikotis, Mental Fisik
10	Dinas KESSOS dan KB	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Pembinaan anak nakal
11	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup(DPLH)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Pengendalian Lingkungan Hidup
12	Dinas pertanian	penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
13	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

14	DISNAKER TRANS dan PERMAS	Penyuluhan Transmigrasi Regional
15	DISNAKER TRANS dan PERMAS	Penyebarluasan Informasi Bursa tenaga Kerja *Wajib lapor lowongan tenaga kerja*
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi (workshop pengolahan limbah listrik)

e. **ASB-029 SOSIALISASI PROGRAM/ PRODUK** diubah menjadi :

Deskripsi :

Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.

Pengendali belanja *(cost driver)* :
Jumlah peserta sosialisasi, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap *(fixed cost)* :
= Rp. 916.300,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel *(variable cost)* :
= Rp. 101.550,- per jumlah peserta sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 916.300 + (Rp. 101.550 x Jumlah Peserta Sosialisasi x Jumlah Hari)

Alokasi Belanja ASB 029 :

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Honorarium PNS	29, 34 %	0, 00 %	60, 64 %
2.	Belanja Honorarium Non PNS	15, 03 %	1, 28 %	28, 77 %
3.	Belanja Bahan Material	4, 11 %	0, 00 %	12, 33 %
4.	Belanja Bahan Pakai Habis	11, 37 %	0, 00 %	22, 73 %
5.	Belanja Jasa Kantor	0, 25 %	0, 00 %	0, 47 %
6.	Belanja Cetak & Penggandaan	12, 09 %	0, 00 %	30, 77 %
7.	Belanja Sewa	0, 26 %	0, 00 %	0, 71 %
8.	Belanja Makan & Minum	25, 36 %	1, 53 %	49, 18 %
9.	Belanja Perjalanan Dinas	2, 20 %	0, 00 %	4, 97 %

CONTOH KEGIATAN ASB 029

No.	Satker	Kegiatan
1	DISNAKER TRANS dan PERMAS	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Terhadap Tindak Kekerasan
2	DPKD	Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
3	Sekretariat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4	Sekretariat Daerah	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Fasilitasi Peningkatan Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
6	DISNAKER TRANS dan PERMAS	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
7	DISNAKER TRANS dan PERMAS	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8	DISNAKER TRANS dan PERMAS	Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (PUG)
9	DISNAKER TRANS dan PERMAS	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
10	Badan Perencanaan Daerah	Koordinasi Penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
11	Kesbanglinmas	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam hidup

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5 Jan 2009

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 5 Jan 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 26.